



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 59 TAHUN 2022

TENTANG

ROAD MAP PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2022 - 2024

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang** :
- a. bahwa tingkat inflasi yang tinggi dan tidak stabil menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian daerah dan menghambat daya saing perekonomian daerah sehingga perlu dilakukan pengendalian inflasi daerah secara terpadu dan terkoordinasi dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait;
 - b. bahwa untuk memberikan arahan pelaksanaan pengendalian inflasi, diperlukan *Road Map* (peta jalan) dalam kerangka perencanaan strategis tingkat daerah yang mendukung dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Road Map* Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2022 - 2024;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1010/PMK.010/2021 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022, Tahun 2023, dan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : ROAD MAP PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2022-2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Inflasi adalah kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu.
5. Peta Jalan (*Road Map*) Pengendalian Inflasi Daerah adalah rencana strategis yang memberikan arahan dalam pengendalian inflasi daerah.
6. Inflasi Daerah adalah kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangkah waktu tertentu.

Pasal 2

Peta Jalan (*Road Map*) Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2022-2024 merupakan pedoman bagi perangkat daerah maupun Instansi terkait dalam melaksanakan Pengendalian Inflasi di Kabupaten Bombana selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 3

Peta Jalan (*Road Map*) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2022-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II
PEMBIAYAN

Pasal 4

Pembiayaan pelaksanaan Peta Jalan (*Road Map*) Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2022- 2024 bersumber dari:

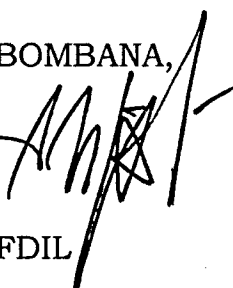
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bombana,
- c. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah.
- d. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB III
PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal 8 Agustus 2022

BUPATI BOMBANA,



TAFDIL

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 8 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,


MAN ARFA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2022 NOMOR... 59

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BOMBANA
 NOMOR : 59 TAHUN 2022
 TENTANG
 ROAD MAP PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
 KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2022 - 2024

ROAD MAP PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2022 - 2024

4 KEY STRATEGIS	PROGRAM	SUB PROGRAM	TIME LINE TARGET			Multi Sektor
			2022	2023	2024	
1. KETERJANGKAUAN HARGA	Stabilitas Harga	Efektifitas Kegiatan Operasi pasar, Ketersediaan Pasokan dan Stabilitas Harga(KPSH) untuk Komoditi Beras Maupun komoditas yang lain, penyumbang Inflasi utama di tati Distribusi Utama	Dilaksanakan sepanjang tahun sesuai kebijakan Kementerian Perdagangan dan Sasaran Komoditi beras sebagai Program Cadangan Beras Pemerintah dan Komoditi Pangan	Dilaksanakan sepanjang tahun sesuai Kebijakan Kementerian Perdagangan dan Sasaran Komoditi beras sebagai Cadangan Beras Pemerintah dan Komoditi Pangan	Dilaksanakan sepanjang tahun sesuai Kebijakan Kementerian Perdagangan dan Sasaran Komoditi beras sebagai Program Cadangan Beras Pemerintah dan Komoditi Pangan	Kancapem
			7 Kelompok	14 Kelompok	22 Kelompok	
	Mengelola permintaan	Gerakan Pengembangan Pertanian terpadu Pemberdayaan Wanita tani(GP2T-PWT)				

Stabilitas harga	Pelaporan informasi pasar/pemantauan pasar di tingkat petani dan pasar	Laporan perminggu	Laporan perminggu	Laporan perminggu	Dinas pertanian
Stabilitas Harga	<p>Stabilitas harga dengan Optimalisasi Pasar murah/Operasi pasar murah 10 bahan makanan pangan Strategis</p>	<p>1. Dilaksanakan sepanjang tahun. Pasar murah dilakukan menjelang perayaan hari raya nasional. Operasi pasar dilaksanakan saat terjadi Inflasi.</p> <p>2. Sasaran komoditi beras dan komoditi Pangan Lainnya.</p>	<p>1. Dilaksanakan sepanjang tahun. Pasar murah dilakukan menjelang perayaan hari raya nasional. Operasi pasar dilaksanakan saat terjadi Inflasi.</p> <p>2. Sasaran komoditi beras dan komoditi Pangan Lainnya.</p>	<p>1. Dilaksanakan sepanjang tahun. Pasar murah dilakukan menjelang perayaan hari raya Nasional. Operasi pasar dilaksanakan saat terjadi Inflasi.</p> <p>2. Sasaran komoditi beras dan komoditi Pangan Lainnya.</p>	<p>Dinas Perindakop dan UKM Kab. Bombana</p>
Stabilitas Harga	<p>Pemantauan Harga dan Stok Bahan Pangan Pokok</p>	<p>Pemantauan harga secara berkala setiap hari untuk bahan pokok:</p> <p>1. 3 Pasar besar di Kab. Yaitu Psr Tadoha Mapaccing, Psr Boepinang dan Psr Sikeli</p>	<p>Pemantauan harga secara berkala setiap hari untuk bahan pokok:</p> <p>1. 3 Pasar besar di Kab. Yaitu Psr Tadoha Mapaccing, Psr Boepinang dan Psr Sikeli.</p>	<p>Pemantauan harga secara berkala setiap hari untuk bahan pokok:</p> <p>1. 3 Pasar besar di Kab. Yaitu Psr Tadoha Mapaccing, Psr Boepinang dan Psr Sikeli.</p>	<p>Dinas Perindagkop dan UKM dan Dinas Ketahanan Pangan</p>

		4. Loko Modern se-Kab. Bombana	4. Loko Modern se-Kab. Bombana	4. Loko Modern se-Kab. Bombana	
	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	365 Laporan	365 Laporan	365 Laporan	Dinas Ketahanan Pangan
	Stabilitas Harga Ikan Laut	Musim Barat antipasi terjadi inflasi Bulan Desember- April	Musim Barat antipasi terjadi inflasi Bulan Desember- April	Musim Barat antipasi terjadi inflasi Bulan Desember- April	Dinas Perikanan & Perindagkop dan Perhubungan

	Koordinasi dan pemantauan pos-pos terkait ikan yang keluar daerah	Stabilnya harga ikan	Stabilnya harga ikan	Stabilnya harga ikan	Dinas Perikanan, Dinas Perindagkop dan Perhubungan
	Alternatif konsumsi ikan payau (tambak) dan ikan air tawar (kolam)	Konsumsi-ikan perkapita naik	Konsumsi-ikan perkapita naik	Konsumsi-ikan perkapita naik	Dinas Perikanan, Dinas Perindagkop dan Perhubungan
	Gerakan Pengembangan Pertanian terpadu-Pemberdayaan wanita tani (GP2T-PWT)	7 Kelompok	14 Kelompok	22 Kelompok	Dinas Pertanian,
	Diversifikasi Konsumsi Bahan Makanan melalui pemanfaatan program dikelurahan, puskesmas dan sekolah.				
	a. Sosialisasi diversifikasi	Konsumsi beras per kapita menurun	Konsumsi beras per kapita	Konsumsi beras per kapita	Dinas Kerebuan dan Pangan

2 KETERSEDIAAN PASOKAN	Memperkuat produksi, cadangan	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal.	4 KWT Penumbuhan dan 2 KWT Pengembangan	5 KWT Penumbuhan dan 4 KWT Pengembangan	5 KWT Penumbuhan dan 4 KWT Pengembangan	Dinas Ketahanan Pangan
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	4 Kali	4 Kali	4 Kali	Dinas Ketahanan Pangan
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	4 Kali	4 Kali	4 Kali	Dinas Ketahanan Pangan
		Penyediaan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal	-	6 Produk	6 Produk	Dinas Ketahanan Pangan
		Pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan	-	1 Unit	1 Unit	Dinas Ketahanan Pangan
		Pengembangan kelembagaan usaha pangan masyarakat dan toko tani Indonesia	-	2 Unit	2 Unit	Dinas Ketahanan Pangan

			pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 Daerah Kab/Kota				

	Memperkuat Produksi, cadangan Pangan, Pemerintah dan Pengolaan	Peningkatan produksi melalui peningkatan produktivitas dan perluasan areal					
		1 Peningkatan produksi melalui LTT cabe merah, bawang dan tomat	cabe 20, bawang 10 (APBN)	cabe 30, bawang 15 ha, tomat 10 ha (APBN)	cabe 40, bawang 20, tomat 20 (APBN)		Dinas Pertanian
		2 Pengembangan padi sawah	lahan kering 28 ha (APBD), 1755 ha (APBN)	50 ha (APBD), 3000 ha (APBN)	600 ha (APBD), 5000 ha (APBN)		Dinas Pertanian
		3 Perluasan areal melalui cetak sawah	42 ha (APBD)	45 ha (APBD)	45 ha (APBD)		Dinas Pertanian
		4 GP2TWT(Gerakan Pengembangan Pertanian Terpadu Pemberdayaan	7 Kelompok	14 Kelompok	22 Kelompok		Dinas Pertanian
		5 IB sapi	600 ekor(APBN)	1000 EKOR(APBN)	1500 Ekor(APBN)		Dinas Pertanian
		6 Peningkatan Produksi Ayam Ras	5 kelompok, 4800 ekor (APBN)	5 kelompok 6000 ekor (APBN)	5 kelompok 7500 ekor (APBN)		Dinas Pertanian

								Dinas Pertanian
		7	Program Peningkatan Jaringan Irigasi	7 titik (APBN)	25 titik (APBN)			Dinas Pertanian
		8	Pengadaan sarana dan prasarana alsin		TR 4 (2 Buah), TR 2 (6 buah), pompa 3 inci (3 buah), pompa 4 inci (10 buah), hand sprayer 10 buah, kultivator 2 buah APBN.	TR 4 (2 Buah), TR 2 (6 buah), pompa 3 inci (3 buah), pompa 4 inci (10 buah), hand sprayer 10 buah, kultivator 2 buah APBN.		Dinas Pertanian
	Memperkuat Produksi, cadangan pangan pemerintah, dan pengelolaan ekspor impor pangan			Jumlah Komoditas pemantauan 20 Komoditi (47 varian) barang kebutuhan pokok dan bahan pangan Lainnya,serta 9 komoditi (29 varian) barang penting	Jumlah Komoditas pemantauan 20Komoditi (47 varian) barang kebutuhan pokok dan bahan pangan Lainnya,serta 9 komoditi (29 varian) barang penting	Jumlah Komoditas pemantauan 20Komoditi (47 varian) barang kebutuhan pokok dan bahan pangan Lainnya,serta 9 komoditi (29 varian) barang Penting		Dinas Perindakop dan UKM
		1	Pengumpulan serta pelaporan data harga dan Stok/pasokan bapokting secara harian melalui Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KPP)					
		2	Menjaga ketersediaan bahanm pangan pokok untuk memenuhi kebutuhan operasi pasar dan pasar murah	Beras Premium,Minyak Goreng,Gula pasir, Tepung, Terigu, Daging Ayam,dan Telur ayam Broiler	Beras Premium,Minyak Goreng,Gula pasir, Tepung, Terigu, Daging Ayam,dan Telur ayam Broiler	Beras Premium,Minyak Goreng,Gula pasir, Tepung, Terigu, Daging gAyam,dan Telur ayam Broiler		Dinas Perindakop dan UKM
		3.	Optum ahnsasi Sumberdaya Lahan Tambak	1 klp	2 klp	2klp		Dinas

	Pengadaan parcing rawai	0 unit	5000 unit	5000 unit	Dinas perikanan
	pengadaan perahu sampan fiber Glass		150 unit	5000 unit	Dinas perikanan
	pengadaan kapal 3 GT		120 unit	150 unit	Dinas perikanan
	Pengadaan kapal3-5 GT		50 unit	50 unit	Dinas perikanan
	Pengadaan kapal 5 -10 GT		10 unit	10 unit	Dinas perikanan
	Pengadaan kapal 10 - 20 GT		10 unit	10 unit	Dinas perikanan
	Pengadaan kapal >20 GT		5 unit	5 unit	Dinas perikanan
	Pengadaan Pukat ikan		500 unit	500 unit	Dinas perikanan
	Pengadaan pukat ikan tenggiri		100 unit	100 unit	Dinas perikanan
	pengadaan pukat udang		500 unit	500 unit	Dinas perikanan
	pengadaan pukat ikan rumah rumah		100 unit	100 unit	Dinas perikanan
	pengadaan tambahan perahu		10 unit	10 unit	Dinas perikanan
	pengadaan jaring insan hanyut		300 unit	300 unit	Dinas perikanan
	pengadaan jala tebar		300 unit	300 unit	Dinas perikanan
	pengadaan rumah ikan(fist apartemen)		100 koloni	100 koloni	Dinas perikanan
	pengadaan karang buata		100 koloni	100 koloni	Dinas perikanan
	pengadaan rumput		50 unit	50 unit	Dinas perikanan

		pengadaan rumpon dasar		50 unit	50 unit	Dinas perikanan	
		pengadaan jaring insan tetap		50 unit	50 unit	Dinas perikanan	
		pengadaan sero		20 unit	20 unit	Dinas perikanan	
		pengadaan bagang perahu		20 unit	20 unit	Dinas perikanan	
		pengadaan bagang tancap		10 unit	10 unit	Dinas perikanan	
		pengadaan bagng cunghkil		10 unit	10 unit	Dinas perikanan	

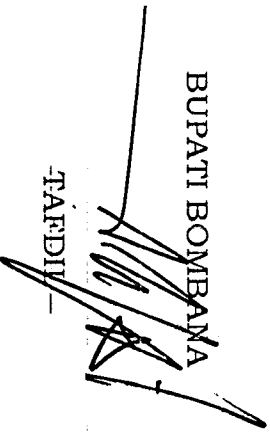
		pengadaan kapal operasional pengelola produksi perikanan tangkap		30 unit	30 unit	Dinas perikanan
		pengadaan Fish Fiber		2 unit	2 unit	Dinas perikanan
	Memperkuat kelembagaan	Perluasan akses dan distribusi asuransi pertanian	2 kecamatan (Poleang Timur dan Poleang Utara) (APBN)	10 kecamatan	100% petani mendapatkan asuransi pertanian	Dinas pertanian
		Peningkatan kelas kemampuan kelompok	Pemula 1.176 Lanjut 86 Madya 4 Utama 2	Pemula 1.083 Lanjut 171 Madya 13 Utama 3	Pemula 926 Lanjut 299 Madya 39 Utama 5	Dinas pertanian
		Pengembangan usaha dan penguatan kelembagaan peternakan melalui asuransi usaha ternak sapi	26 Kelompok, 1047 ekor, 80% APBN, 20% (APBD)	1500 ekor (APBN)	2000 EKOR (APBN)	Dinas pertanian
		Pemanfaatan skema perbankan bagi UMKM	Belanja bantuan subsidi bunga kredit bagi usaha mikro kecil dan menengah	Belanja bantuan subsidi bunga kredit bagi usaha mikro kecil dan menengah	Belanja bantuan subsidi bunga kredit bagi usaha mikro kecil dan menengah	Dinas Perindakop dan UKM
		Sertifikasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah Kab/Kota		10 Sertifikasi	10 Sertifikasi	Dinas Ketahanan Pangan

			Registrasi keamanan pangan segar asal tmbuhan daerah Kab/Kota	-	10 Dokumen	10 Dokumen	Dinas Ketahanan Pangan
			Rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah Kab/Kota	-	1 Dokumen	1 Dokumen	Dinas Ketahanan Pangan
			Penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah Kab/Kota.	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Dinas Ketahanan Pangan
3	KELANCARAN DISTRIBUSI	Memperkuat Kelembagaan	Penguatan kelembagaan keamanan pangan segar daerah Kab/Kota	-	1 Paket	1 Paket	Dinas Ketahanan Pangan

	Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau Barang Antar Kota	1 Unit	2 Unit	2 Unit	Dinas Perhubungan
	Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi Badan Usaha yang berdomisili dalam daerah Kab/Kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah Kab/Kota	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha angkutan laut kewenangan Kab/Kota	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	Dinas Perhubungan
	Pembangunan, Penerbitan izin pemb. Dan pengoperasian pelabuhan pengumpul lokal	Pembangunan Pelabuhan Pengumpul lokal	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Dinas Perhubungan
		Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan pengumpul lokal	4 Unit	4 Unit	4 Unit	Dinas Perhubungan

4. KOMUNIKASI EFEKTIF	Memperbaiki Kualitas Data	Peningkatan Korelasi data PIHPS dan BPS	Meningkatkan sinergitas data SP2KP dengan BPS, dengan jumlah pasar pantauan sebanyak 12 pasar.	Meningkatkan sinergitas data SP2KP dengan BPS, dengan Jumlah pasar pantauan sebanyak 12 pasar	Meningkatkan sinergitas data SP2KP dengan BPS dengan Jumlah pasar pantauan sebanyak 12	Dinas Perindagkop dan UKM
		Memperkuat Koordinasi Pusat dan Daerah	Rapat Koordinasi Nasional Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)	Rapat Koordinasi HBKN Pusat dengan Stakeholder terkait, pelaku usaha bapak	Rapat Koordinasi HBKN Pusat dengan Stakeholder terkait pelaku Bapak.	Dinas Perindagkop dan UKM

BUPATI BOMBANA


FARID